

ABSTRAK

YOFAN FATHURROHMAN. NIM. E. 1611260. Pertanggungjawaban Korps Brimob Dalam Proses Salah Tangkap Terduga Pelaku Teroris Pada Operasi Tinombala Poso. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2022. Ancaman dan gangguan itu, akan terus berkembang seiring dengan perkembangan situasi saat ini, baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial masyarakat yang bergerak secara dinamis dan cepat sehingga dapat mempengaruhi timbulnya kondisi global keamanan dalam negeri. Terkait dengan tugas, fungsi dan peranan Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat baik sebagai penegak hukum maupun sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat, maka Polri beserta seluruh jajarannya termasuk Korps Brimob Polri memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat besar untuk mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang kondusif, sebagaimana tertuang dalam program Nawacita presiden Republik Indonesia yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia Korps Brimob Polri sebagai pilar utama Polri dalam menghadapi kejahatan berintensitas tinggi dituntut harus siap mengemban tugas dari ancaman dan gangguan keamanan yang saat ini masih terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban korps brimob dalam proses salah tangkap pelaku teroris pada Operasi Tinombala Poso dan akibat hukum bagi anggota Korps Brimob yang melakukan proses salah tangkap pelaku teroris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa pertanggungjawaban Korps Brimob dalam proses salah tangkap kejahatan teroris adalah melakukan rehabilitasi terhadap tersangka, dimana rehabilitasi merupakan lanjutan ketentuan dari ganti rugi. Kalau ganti kerugian di atur dalam dua Pasal, rehabilitasi diatur dalam satu Pasal saja, yakni Pasal 97 KUHAP. Dengan demikian masih diharapkan peraturan pelaksana. Rehabilitasi adalah hak seseorang yang mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Salah Tangkap, Teroris.

ABSTRACT

YOFAN FATHURROHMAN. NIM. E. 1611260. *Responsibilities of the Mobile Brigade Corps in the Process of Arresting of Suspected Terrorist Actors in the Poso Tinombala Operation . Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2022.* These threats and disturbances will continue to develop in line with the development of the current situation, both in the political, economic and social fields, which move dynamically and rapidly so that they can affect the emergence of global conditions for domestic security. With regard to the duties, functions and roles of the National Police in maintaining security and public order, both as law enforcers as well as as protectors, protectors and public servants, the Police and all their staff, including the Mobile Brigade Corps of the Police have enormous duties and responsibilities to realize the domestic security situation. conducive environment, as stated in the Nawacita program of the president of the Republic of Indonesia, which is to bring back the state to protect the entire nation and provide a sense of security to all Indonesian citizens. The Brimob Police Corps as the main pillar of the National Police in dealing with high-intensity crime is required to be ready to carry out tasks from threats and security disturbances. which is still happening today. The purpose of this study was to find out and analyze the responsibility of the Brimob corps in the process of wrongly arresting terrorist actors in the Poso Tinombala Operation. The research method used is a normative juridical research method, namely the law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogma. The results of the study revealed that the responsibility of the Brimob Corps in the process of catching a terrorist crime was to rehabilitate the suspect, where rehabilitation is a continuation of the provision of compensation. If compensation is regulated in two articles, rehabilitation is regulated in only one article, namely Article 97 of the Criminal Procedure Code. Thus, the implementing regulations are still expected. Rehabilitation is the right of a person who has his/her rights restored in terms of ability, position, and dignity as well as given at the level of investigation, prosecution, or trial because he was arrested, detained, prosecuted, or tried without any reason based on the law or because of a mistake regarding the person or applied law.

Keywords: Accountability, Wrong Arrest, Expected, Terrorist.